

## DAFTAR BACAAN

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945;  
 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral;  
 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;  
 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;  
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;  
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan;  
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;  
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;  
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;  
 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen;  
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;  
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank;  
 Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;  
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum;  
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;  
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat;  
 KUH Perdata (BW);  
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DIKSP Tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*);

### **Buku**

Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung.  
 Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.  
 Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XII, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Siti Hidayati, et.al., *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia, 2006).
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.
- Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta.

### **Jurnal**

- Endang Retnowati, “Penegakan Hukum dan bentuk *Fraud* Dalam Kegiatan Usaha Bank”, *Perspektif*, Volume 27, Nomor 1, Edisi Januari, Tahun 2022.
- Haikal Ramadhan, Aminah, dan Suradi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*E-money*)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu *e-money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Edisi Agustus, Tahun 2021.
- Ninuk Triyanti, “Pengaturan Dan Peran Bank Indonesia Dalam Memperkuat Sektor Perbankan”, *Perspektif*, Volume VIII, Nomor 2, Edisi April, Tahun 2003.
- Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, Edisi Januari, Tahun 2017.
- Suharni, “Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Edisi April, Tahun 2018.
- Theodosia Yovita, “Kejahatan Korporasi Dalam Hukum Perbankan Indonesia”, *Perspektif*, Volume X, Nomor 2, Edisi April, Tahun 2005.
- Zennia Almaida, Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif Dan represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Jurnal Repertorium*, Volume VII, Nomor 1, Tahun 2020.

### **Website**

- Rivki, Pembayaran E-Money di Tol Digugat Warga Bogor ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-3715565/pembayaran-e-money-di-tol-digugat-warga-bogor-ke-mk>, 2017.